



Minta Eksekutif Kelola Anggaran Lembaga Dewan

● DPRD Klungkung Pangkas Perjalanan Dinas Untuk Penangan Covid-19

PIMPINAN Alat Kelengkapan Dewan menggelar rapat di Kantor DPRD Klungkung, Senin (30/3). Dalam rapat tersebut disepakati, beberapa kegiatan anggota dewan, termasuk perjalanan dinas dipotong untuk keperluan penanganan Covid-19 di Klungkung. Jumlahnya mendekati angka Rp 2 miliar.

Ketua DPRD Klungkung AA Gde Anom mengatakan, setelah dilakukan rapat, memang ada beberapa anggaran di lembaga dewan yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh eksekutif untuk penanganan Covid-19.

Anggaran tersebut antara lain, kegiatan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur sekitar Rp 150.000.000, lalu penyelenggaraan pengawasan pemerintah daerah Rp

468.550.000.

Anggaran Pembahasan Rancangan Perda Rp 100.000.000, anggaran fasilitas rapat Rp 176.600.000 dan termasuk anggaran perjalanan dinas keluar daerah Rp 1.052.000.000. Sehingga anggaran dari lembaga dewan yang dapat dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Klungkung mencapai Rp 1.947.150.000.

"Silakan eksekutif menggunakan anggaran itu untuk menanggulangi Covid-19 di Klungkung. Kami tidak akan ikut campur, silakan memanfaatkan asal untuk penanganan Covid-19," ujar AA Anom.

Anggaran itu nantinya juga bisa dimanfaatkan untuk pengadaan masker dan APD (Alat Pelindung Diri) bagi petugas medis di RSUD Klungkung, yang merawat

pasien dalam pengawasan Covid-19.

"Saya mendapatkan informasi, RSUD Klungkung dalam sehari bisa memerlukan 15 APD. Masker juga sangat dibutuhkan. Nanti bisa untuk itu anggarannya," tegasnya.

Ia juga mendorong seluruh aparatur desa dan adat untuk ikut aktif melakukan gerakan pencegahan mewabahnya Covid-19. Mengingat pencegahan Covid-19 harus dilaksanakan bersama-sama dari tingkat paling bawah.

"Yang bisa menggerakkan masyarakat di desa adalah aparat desa dan pihak prajuru adat. Ini yang harus ikut aktif bergerak bersama-sama, untuk mengikuti instruksi pemerintah dalam penanganan Covid-19 ini," ungkap AA Gde Anom. (adv/ mit)



Disbudpora Klungkung Batalkan Penggunaan Rp 1,9 Miliar

● Buntut Peniadaan Kegiatan PKB 2020

SEMARAPURA, TRIBUN BALI - Pemkab Klungkung telah mengalokasikan Rp 1,9 miliar untuk gelaran Pesta Kesenian Bali (PKB) tahun 2020. Setelah PKB resmi ditiadakan, anggaran itu pun akan dialihkan ke kegiatan lain yang lebih mendesak.

Pt Kadis Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disbudpora) Klungkung Luh Ketut Ari Citrawati menjelaskan, anggaran PKB bersumber dari BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Badung dan provinsi sebesar Rp 1,9 miliar lebih. Dengan ditiadakannya PKB tahun ini, anggaran tersebut akan direalokasi kembali ke Baperlitbang.

"Setelah ada surat resmi PKB ditiadakan, saya langsung meneruskannya kepada bidang terkait. Tindaklanjutnya, anggaran untuk PKB agar dicek lebih lanjut, agar bisa dialihkan untuk kegiatan lain," ungkap Luh Ketut



TRIBUN BALI/ EKA MITA SUPUTRA

LUH KETUT ARI CITRAWATI

Ari Citrawati, Rabu (1/4).

Menurutnya, sejauh ini belum ada pencairan anggaran, baik untuk pembinaan maupun mempersiapkan perlengkapan lainnya. Persiapan untuk PKB sejauh ini baru sebatas rapat-rapat dan pembinaan. Hanya saja, para peserta yang direncanakan tampil dalam PKB, sudah melakukan

latihan dan pembinaan.

Pihaknya pun mengaku sudah memperkirakan hal ini, melihat situasi sejak awal Februari Covid-19 mulai mewabah. "Nanti anggaran itu bisa dimanfaatkan ke kegiatan lain yang lebih prioritas," ujar Luh Ketut Ari Citrawati.

Sementara Program "Klungkung Menari" yang digelar Disbudpora juga ditiadakan. "Klungkung Menari" digelar setiap akhir bulan, untuk menghibur masyarakat.

Pihaknya sudah menyampaikan ditiadakannya "Klungkung Menari", baik ke masyarakat maupun ke pihak yang akan tampil. Masyarakat diharapkan tetap membatasi aktivitas dan mencari alternatif hiburan lain sembari tetap berada di rumah. "Sekarang kan banyak alternatif hiburan di internet, itu bisa dimanfaatkan masyarakat selama masa *social distance* ini," jelasnya. **(mit)**



HUKUM

Koruptor Tak Sanggup Bayar Denda

NEGARA, Radar Jembrana- Terpidana kasus korupsi santunan kematian, I Komang Budiarta, tidak bisa membayar denda yang dibebankan sesuai dengan putusan pengadilan. Mantan Kaling Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, tersebut, jadi terpidana ketiga yang tidak mampu membayar denda kasus korupsi yang sama.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana Ivan Praditya Putra mengatakan, pihaknya sudah melakukan eksekusi terhadap terpidana, yang sudah menjalani kurungan sejak tahap kedua. Pada saat eksekusi juga sudah diminta kejelasan mengenai denda yang dibebankan pada terpidana. "Terpidana tidak bisa membayar denda," jelasnya, Kamis (2/4).

Terpidana terbukti melanggar pasal 3 *jungto* pasal 18 UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sebagaimana yang telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang Tipikor. Terpidana divonis 1 tahun pidana penjara dan membayar denda sebesar Rp 50 juta, apabila tidak dibayar diganti kurungan 15 hari.

Sedangkan, tersangka Tumari dan Ni Luh Sridani, berkas sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Denpasar. Dua tersangka akan segera disidangkan dengan jaksa penuntut umum sebanyak tujuh orang. "Berkas dua tersangka sudah dilimpahkan, tinggal menunggu jadwal sidang," ujar pria yang genap berusia 36 tahun ini, Kamis kemarin.

Sedangkan tiga terpidana sebelumnya, hanya Indah Suryaningsih yang membayar denda dan membayar uang pengganti kerugian negara. Sedangkan Klian Banjar Munduk Ranti Tukadaya I Gede Astawa dan mantan Klian Banjar Sarikuning Tulungagung Tukadaya I Dewa Ketut Artawan, divonis 4 tahun pidana penjara dengan denda masing-masing Rp 200 juta. Apabila tidak dibayar, akan diganti dengan kurungan 1 bulan. Keduanya juga dibebani uang pengganti, namun tidak membayar. (bas/djo)



Wawali Gelagapan

YANG menarik, saat dihubungi terpisah Jaya Negara memberikan keterangan berbeda. Dia mengaku bertemu Rumega untuk urusan pribadi. Namun, saat disinggung kehadirannya bersama mantan perbekel Desa Dauh Puri Klod Namiartha dan Agus Wiragama yang merupakan suami terdakwa korupsi Ariyaningsih, Jaya Negara terdengar kaget.

Sekretaris DPD PDIP Bali itu juga menyebut pertemuan itu membahas soal Permen Hukum dan HAM tentang pembebasan narapidana (napi) untuk mencegah penularan Covid-19 di Lapas atau Rutan.

Nah, terkait kehadiran suami terdakwa Ariyaningsih, Jaya Negara mengatakan wajar. "Dia kan memang harus mendapat penjelasan soal ini (napi/ tahanan yang dipulangkan)," katanya.

Ketika disinggung keteran-

gannya berbeda dengan Rumega, Jaya Negara kembali terdengar gugup. Dikatakan, awalnya dirinya membicarakan soal rencana mecaru. Selain itu, juga membicarakan permohonan karena di pusat ada kebijakan, apa mungkin ada kebijakan untuk terdakwa karena Covid-19.

Penjelasan Jaya Negara ini sedikit janggal. Sebab, Agus bukan pejabat, bukan pula politikus, tapi bisa dibantu mendapat

penjelasan tentang pembebasan napi. Hebatnya lagi, yang ditemui adalah wakil ketua PN Denpasar plus didampingi anggota DPRD

Kota Denpasar.

Dalam sidang perkara korupsi Ariyaningsih sebelumnya, nama Jaya Negara memang sempat disebut. Ketika muncul temaun raibnya Silpa APBDes, Namiartha mengajak petinggi desa lainnya menghadap ke Jaya Negara. Saat itu, Jaya Negara minta agar masalah ini segera diselesaikan, karena Namiartha saat itu sedang proses pencalonan sebagai anggota DPRD dari PDIP. (san/yor)



Jaya Negara, Namiarta, dan Suami Terdakwa Temui Hakim

Diterima di Ruang Kerja Hakim PN Denpasar

DENPASAR, Radar Bali - Tindakan mengejutkan dilakukan Wayan Gde Rumega yang juga wakil ketua PN Denpasar. Rumega yang bertindak sebagai hakim ketua dalam kasus korupsi APBDes Dauh Puri Klod, Denpasar Barat, kemarin (2/4) siang berani menerima para pihak yang sedang terkait dengan perkara korupsi, di ruang kerjanya di lantai dua PN Denpasar.

Pihak berperkara yang menemui Rumega adalah I Made Agus Wiragama, suami terdakwa Ni Putu Ariyaningsih. Agus datang bersama wakil wali kota Denpasar IGN Jaya Negara dan mantan perbekel Desa Dauh Puri Klod yang kini menjadi anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Denpasar, I Gusti Made Namiartha. Kehadiran

Namiartha ini juga semakin menebar bau tidak sedap.

Sebab, dalam kasus korupsi APBDes Dauh Puri Klod, Namiartha berstatus sebagai saksi. Namiartha ikut diperiksa di Kejaksaan dan sudah diperiksa di Pengadilan Tipikor Denpasar beberapa waktu lalu. Menariknya, Jaya Negara bersama Agus dan Namiartha diterima di ruang kerja Rumega.

Saat diwawancarai menyoal pertemuan tersebut, Rumega tampak gelagapan. Nada suaranya terdengar bergetar seperti orang grogi. Ketika ditanya apa saja yang dibicarakan dengan Jaya Negara, Rumega mengatakan pertemuan tersebut hanya membahas soal perkembangan Covid-19.

"Tyang minta bantuan, kami kan tidak punya dana untuk menyemprot (disinfektan) dan beli hand sanitizer (penyantiasi tangan). Tyang minta tolong (wakil wali kota) dibantu," tutur Rumega dengan nada

bergetar. Memang sedikit aneh ketika pejabat yang dimintai bantuan malah yang datang ke tempat yang meminta.

Ditanya apakah ada membahas masalah kasus korupsi APBDes Dauh Puri Klod mengingat kehadiran suami terdakwa, Rumega menyangkal. Ia mengaku tidak ada membahas masalah itu. Saat didesak apakah hal itu tidak melanggar kode etik, Rumega enggan menjawab. "Saya tidak mau bicara hal itu," sergahnya.

Kembali dikejar apakah kedatangan wakil wali kota hendak membicarakan kasus korupsi APBDes, Rumega menyebut Jaya Negara tidak ada menyinggung hal itu. "Saya hanya minta bantuan untuk Covid-19 melihat situasi seperti sekarang jangan sampai ada korban," kelitnya.

Terkait kedatangan Agus atau suami terdakwa, Rumega berdalih masalah mengajak tidak tahu menahu.

"Saya kalau suami (terdakwa) tidak memperhatikan. Saya setelah pertemuan baru tahu. Kalau (mantan) perbekel saya tanya ada urusan apa? Dijawab urusan Covid-19," kelitnya lagi.

Kembali dikejar apakah benar tidak ada membahas kasus korupsi, Rumega mengatakan tidak ada. Rumega menyebut dirinya terbuka dengan siapa saja untuk urusan kepentingan kantor. "Mereka ke sini mendedak. Karena situasi (pandemi Covid-19) seperti ini, jadi harus serba cepat ditangani. Saya dibantu, syukur. Tidak (dibantu) juga tidak apa-apa. Saya mau dibantu tapi tanpa ikatan," dalihnya.

Disinggung apakah ada

kemungkinan tukar guling penyemprotan dengan perkara korupsi APBDes, Rumega langsung membantah. "Tidak ada. Saya juga tidak mau," bantah dia.

Diterimanya Jaya Negara beserta Agus dan Namiartha ini patut dipertanyakan. Meski Rumega berdalih tidak membahas perkara yang sedang disidangkan, pertemuan tersebut diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Dalam KEPPH hakim dituntut untuk selalu berpegang teguh pada KEPPH. Komisi Yudisial (KY) sendiri dalam arahnya mewanti-wanti hakim agar tidak bertemu dengan pihak berperkara. (san/yor)



RADAR BALI TRIBUN BALI BALI POST NUSA BALI

KLUNGKUNG

Kegiatan Dinas PUPRKP Tidak Bisa Terealisasi

SEMARAPURA, *Radar Bali*- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman (PUPRKP) Klungkung harus merelakan sejumlah paket kegiatan tidak terealisasi di tahun ini. Itu lantaran adanya surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-247/MK.07/2020 tertanggal 27 Maret 2020 perihal penghentian proses pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman (PUPRKP) Klungkung, Anak Agung Gede Lesmana menuturkan, ada tiga bidang di Dinas PUPRKP Klungkung yang anggaran paket kegiatan bersumber dari DAK di tahun 2020. Adapun tiga bidang tersebut terdiri dari Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Perumahan Permukiman. "Alokasi dana DAK untuk Bidang Bina Marga itu sebesar Rp 22.816.342.000, Bidang Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 4.399.952.000, dan Bidang Perumahan Permukiman (Perkim) sebesar Rp 1.667.890.000," katanya.

Dengan adanya surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-247/MK.07/2020 tertanggal 27 Maret 2020 perihal penghentian proses pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 menurutnya paket pekerjaan yang anggarannya bersumber dari DAK tidak dapat direalisasikan. "Kalau di Perkim sedang proses pelaksanaan dan sudah ada SK sehingga sehingga tidak bisa berjalan. Kalau di SDA sedang proses perencanaan dan sudah ada SK sehingga tidak bisa berjalan juga," terangnya.

Sementara untuk Bidang Bina Marga, menurutnya ada kegiatan yang sudah terkontrak sehingga tetap terbayarkan yang sumber anggarannya menggunakan DAK. Adapun kegiatan yang sudah terkontrak tersebut, yakni kegiatan peningkatan jalan Tanglad Wates senilai Rp 2.991.258.199, kegiatan pemeliharaan jalan Banda-Nyangan Rp 2.326.708.843, dan kegiatan pemeliharaan jalan Banjarangkan-Tohpati Rp 2.054.738.705. "Yang sudah terkontrak tetap terbayarkan. Yang masih proses tender langsung dihentikan," jelasnya. (ayu/han)

Edisi : Kamis, 2 April 2020

Hal : 2



Dicecar Hakim Eks Bendahara Kelimpungan

Kasus Korupsi APBDes Dauh Puri Klod

DENPASAR, Radar Bali - Kegagalan tersaji dalam sidang lanjutan korupsi APBDes Dauh Puri Klod, Denpasar Barat dengan agenda pemeriksaan terdakwa Ni Putu Ariyaningsih, 33. Mantan bendahara itu banyak mengaku tidak tahu saat dicecar majelis hakim perihal berapa sejatinya dana yang dipakai terdakwa.

Terdakwa seperti orang bingung dan sesekali melirik jaksa ketika hakim anggota Nurbaya Lumban Gaol melancarkan pertanyaan berapa dana riil yang digunakan terdakwa.

Hakim Nurbaya menanyakan kapasitas pemberi wewenang dalam hal ini mantan perbekel, hingga terdakwa diberikan kepercayaan mengelola dana miliaran rupiah. Namun, terdakwa Ariyaningsih sambil

melirik jaksa tidak mampu menjelaskan secara gamblang pertanyaan hakim.

Untuk menutupi kesalahannya, terdakwa menyebut semua uang yang dipakai sudah dikembalikan ke kas desa. Ada juga yang dititipkan melalui jaksa penyidik. Namun, jawaban berbelit itu tak memuaskan hakim.

"Saudara Terdakwa, sekali lagi saya tanya, Saudara berapa menggunakan dana silpa (sisa lebih penggunaan anggaran)?" kejar anggota hakim Nurbaya Lumban Gaol.

Sontak, terdakwa langsung terlihat kelimpungan. Wajahnya seperti orang bingung. Para hakim kemudian kompak menanyakan mengapa dana silpa dari tahun ke tahun semakin banyak, saksi kembali tak bisa memberikan jawaban jelas.

Belum selesai rasa bingung terdakwa, hakim sudah menyodorkan pertanyaan lain. Yaitu berapa besar dana yang

sudah dikembalikan. Anehnya, saat ditanya uang yang dikembalikan, terdakwa mendadak lancar menjawab.

"Awalnya saya mengembalikan Rp 46,6 juta, terus Rp 98 juta. Kemudian saat ditahan saya mengembalikkan melalui suami Rp 778 juta," jawabnya.

Namun, hakim belum puas. Hakim mengejar siapa saja yang menggunakan uang dan yang sudah mengembalikan uang selain terdakwa, terdakwa kembali lancar menjawab. Dikatakan terdakwa, mereka yang sudah mengembalikan uang ada kaur keuangan Rp 102 juta, dan mantan kades I Gusti Made Wira Namiartha yang kini menjadi anggota DPRD Denpasar mengembalikan sebesar Rp 8,5 juta. (san/yor)

SAYA: Ni Putu Ariyaningsih, eks bendahara Desa Dauh Puri Klod, saat diperiksa dalam sidang Tipikor di Denpasar.



Sinyal Tersangka Baru Bulan April

Kasus Korupsi APBDes Dauh Puri Klod

DENPASAR, Radar Bali - Mantan bendahara Desa Dauh Puri Klod, Ni Putu Ariyaningsih, 33, yang kini menjadi pesakitan di Pengadilan Tipikor Denpasar bakal memiliki kawan baru dari desanya. Pasalnya, jaksa penyidik Kejari Denpasar memastikan tersangka dalam kasus korupsi dana silpa APBDes Dauh Puri Klod lebih dari satu orang.

Bahkan, penetapan tersangka baru itu tinggal menunggu waktu. Hal itu diungkapkan Kasi Intel Kejari Denpasar, IGN Ary Kesuma. "Yang jelas ada lebih dari satu tersangka. Akhir Maret atau awal April sudah pasti ada tersangka baru," terang Ary kepada Jawa Pos Radar Bali kemarin (21/2).

Lebih lanjut dijelaskan Ary, saat ini pihaknya masih menunggu dan memperdalam keterangan saksi-saksi di persidangan. Keterangan para saksi ini akan mengungkap fakta baru. Setelah mendapat fakta baru dari keterangan para saksi, barulah dilakukan ekspose perkara.

Ari menegaskan, bayangan siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka sudah ada. Hal itu berdasar struktur hukum siapa yang harus bertanggungjawab terhadap



Yang jelas ada lebih dari satu tersangka. Akhir Maret atau awal April sudah pasti ada tersangka baru."

IGN ARY KESUMA.

Kasi Intel Kejari Denpasar

kerugian negara. Namun, hal itu tidak cukup. Perlu diperkuat fakta di persidangan. "Perananannya (calon tersangka) belum muncul sama sekali dalam BAP kami. Semua saling lempar tanggungjawab. Tapi, keterangan di persidangan pasti beda, dan itu menjadi fakta baru," imbuh jaksa asal Gianyar, itu.

Sayangnya, saat ditanya siapa calon tersangka baru itu, Ary enggan mengungkapkan. Jaksa penghobi motor klasik itu menyatakan, semua akan dibuka setelah ekspose internal di kejaksaan. "Tunggu saja, kalau sudah kami tetapkan tersangka baru pasti kami kabari," tukasnya.

Sementara itu, informasi yang diterima koran ini, sejumlah nama berpeluang diseret menjadi tersangka menemani terdakwa Ariyaningsih. Mereka yang berpotensi menjadi pesakitan yaitu sekretaris desa dan kaur keuangan. Ada nama satu lagi yang

sejatinya berpeluang menjadi tersangka, yakni mantan perbekel yang kini duduk sebagai anggota DPRD Kota Denpasar dari Fraksi PDIP I Gusti Made Wira Namiartha.

Nama pria yang akrab disapa Jik Nami itu disebut berulang-ulang dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi dana Silpa APBDes 2015 - 2016 belum lama ini. Namiartha yang saat itu menjabat perbekel dianggap turut bertanggungjawab karena berperan sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa. Penarikan atau pencairan uang didasari tanda tangan Namiartha. Sementara terdakwa sebagai bendahara dianggap bertanggungjawab karena mencairkan dana melebihi kegiatan yang ditentukan.

Pencairan dana desa dilakukan terdakwa, tapi ada juga yang secara langsung dilakukan saksi Namiartha. Selain nama Namiartha, muncul juga nama baru yang turut bertanggungjawab, yaitu Luh Made China Kembar Dewi (sekretaris desa) dan I Putu Wirawan (kaur keuangan desa). Sekretaris desa dianggap bertanggungjawab lantaran tidak memverifikasi slip pencairan. (san/yor)



KORUPSI

Rugikan Rp 1,9 M, Dituntut 8 Tahun, Divonis 2 Tahun

DENPASAR, *Radar Bali* - Nasib baik memihak Wayan Sukertia, 48, terdakwa kasus korupsi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Rendang, Karangasem. Dituntut delapan tahun oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Karangasem, pria yang menjabat ketua UPK itu mendapat diskon hukuman enam tahun penjara.

"Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Wayan Sukertia dengan pidana penjara selama dua tahun," tegas hakim Angeliky Handajani Day, kemarin (1/4).

Dalam sidang yang digelar tanpa tatap muka langsung atau online itu, hakim berbeda pendapat dengan JPU dari JPU tentang pembuktian dan penerapan pasal. JPU berpendapat terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Terdakwa menyuruh dan mengarahkan Ni Wayan Murniati dan Ni Ketut Wartini dalam membentuk kelompok fiktif untuk mencairkan anggaran PNPM. Negara pun dirugikan hingga Rp 1,9 miliar.

Sementara hakim menilai yang terbukti dari perbuatan terdakwa adalah Pasal 3 UU Tipikor, bukan Pasal 2 sebagaimana tuntutan jaksa. Sehingga hakim menghukum terdakwa hanya dua tahun penjara. Menanggapi vonis tersebut, terdakwa yang via webcam didampingi pengacaranya Gede Pasek Suardika dkk, memilih pikir-pikir. Begitu juga dengan JPU Putu Gde Suriawan dari Karangasem. (san/yor)



Dana Desa untuk Penanganan Covid-19 Dinas PMD Gelontor Rp 14 Miliar

“Saat ini dana desa di 27 desa sebesar Rp 36 miliar, namun yang digunakan sebanyak Rp 14 miliar”

Kepala DPMD Kota Denpasar, IB Alit Wiradana

DENPASAR, NusaBali

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Denpasar gelontor Rp 14 miliar dana desa untuk penanganan virus Corona (Covid-19) yang terus meningkat saat ini. Dana desa tersebut diambil dari 27 desa yang digunakan untuk penanganan Covid-19 dan program padat karya di masing-masing desa setempat.

Kepala DPMD Kota Denpasar, IB Alit Wiradana, Kamis (2/4) mengungkapkan, anggaran tersebut digunakan untuk melakukan penanganan fase pertama. Masing-masing desa mengeluarkan anggarannya sendiri yang dipakai untuk desanya sendiri. Anggaran tersebut dikeluarkan sesuai dengan instruksi Walikota Denpasar Nomor : 422.2/420/DPMD tentang percepatan penanganan dan pencegahan penularan Covid-19 di desa se-Kota Denpasar.

Dikatakan Alit Wiradana, instruksi tersebut menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 8 tahun 2020 tentang desa tanggap Covid-19 dan penegasan padat karya tunai desa. Dalam surat tersebut dana desa bisa digunakan untuk pembangunan posko Covid-19, pengadaan masker, pengadaan hand sanitizer, pengadaan disinfektan, penyemprotan disinfektan di desa, biaya sosialisasi/kampanye Covid-19, dan kegiatan lainnya yang bisa mempercepat penanganan Covid-19 sesuai kesepakatan musyawarah dengan BPD.



IB Alit Wiradana

“Saat ini dana desa di 27 desa sebesar Rp 36 miliar, namun yang digunakan sebanyak Rp 14 miliar. Itu untuk fase pertama. Untuk fase kedua dan ketiga kami menunggu instruksi dari pusat seperti apa penanganannya dan anggarannya jika Covid-19 semakin meningkat,” ungkap kadis yang akrab disapa Gus Alit, ini.

Dikatakan Gus Alit, anggaran tersebut juga digunakan untuk program padat karya, dimana proyek pembangunan baik infrastruktur, pembangunan bedah rumah dan pembangunan lainnya akan memanfaatkan warga setempat yang sudah tidak memiliki pekerjaan karena imbas Covid-19. “Mereka kan biasanya sudah nganggur tapi kita seleksi juga yang benar-benar membutuhkan pekerjaan,” imbuhnya.

Bukan hanya pengangguran, program padat karya ini juga untuk warga kurang mampu sehingga mereka bisa memiliki pekerjaan untuk menghidupi sehari-hari keluarga mereka. “Kita utamakan juga yang miskin. Jadi mereka yang tidak mampu juga bisa memiliki penghasilan. Kami bukan hanya melakukan pencegahan Covid-19 tapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat kurang mampu dan pengangguran agar keseharian mereka terpenuhi sesuai instruksi,” ujarnya. **mis**

• DOKNUSABALI



Bupati Tinjau Pembangunan RS Darurat



• NUSABALI/NANTRA

Bupati I Gusti Ayu Mas Sumatri tinjau SKB, rencana dijadikan tempat rumah sakit darurat di Jalan Ahmad Yani Amlapura, Minggu (29/3).

AMLAPURA, NusaBali

Bupati Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumatri, tinjau pembangunan RS Darurat yang memanfaatkan gedung Satuan Pendidikan SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) Karangasem di Jalan Ahmad Yani Amlapura, Rabu (1/4). Bupati Mas Sumatri berharap RS Darurat secepatnya tuntas, apalagi dua pasien ODP (orang dalam pemantauan) telah mendaftar. RS Darurat nantinya digunakan untuk menampung maksimal 52 pasien ODP.

Pembanguna RS Darurat ditarget rampung 90 hari kerja. Diharapkan pembangunannya bisa dipercepat. Bupati Mas Sumatri juga melakukan komunikasi dengan konsultan serta pejabat teknis. "Jangan sampai keburu datang pasien yang masuk dalam ODP, tidak ada tempat untuk melakukan penanganan karena kapasitas di RSUD Karangasem sangat terbatas," ungkap Bupati Mas Sumatri.

Pemantauan meliputi tiga gedung perawatan, dapur,

ruang kerja petugas kesehatan, kamar kecil, ruang tunggu, dan ruang jaga petugas medis. Atap Bangunan dibongkar, genting dipindahkan, diangkut ke luar areal. Nantinya genting diganti dengan spandek. Pohon kelapa juga ditebang agar tidak membahayakan pengunjung. Barang-barang bekas ditempatkan di gudang kemudian diangkut truk Dinas Lingkungan Hidup.

Bupati Mas Sumatri mengatakan, anggaran untuk RS Darurat Rp 10 miliar. Selain rehab gedung juga untuk pengadaan alat-alat kesehatan dan biaya selama melakukan perawatan pasien. Anggaran berasal dari DID (Dana Insentif Daerah) Rp 2,6 miliar, DAU (Dana Alokasi Umum) Rp 6,4 miliar, dan DAK (Dana Alokasi Khusus) kesehatan non fisik Rp 1,4 miliar.

Bupati turun didampingi Kadis Lingkungan Hidup I Gede Ngurah Yudiantara, Kabag Humas dan Protokol Edy Setiadi Dwijantoro, Kepala Bidang PNF dan PAUD Disdikpora Karangasem I Nyoman Adil, Kabid Pembinaan SMP Disdikpora I Gusti Ngurah Arta, Kepala Satuan Pendidikan SKB Karangasem I Wayan Oka. @ k16



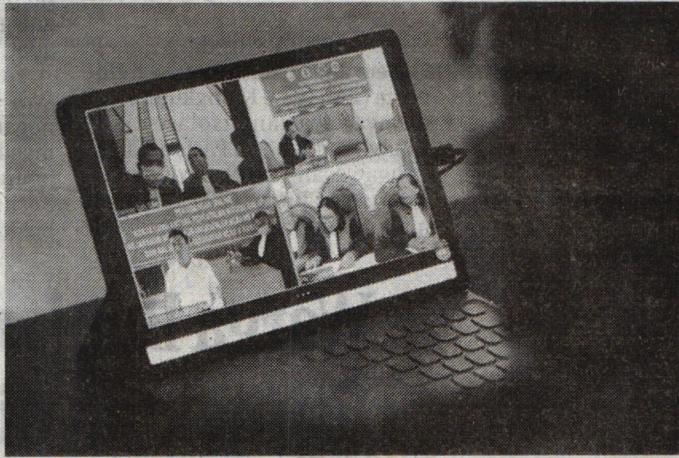
Ketua PNPM Rendang Dihukum Ringan

★ JPU Tuntut 8 Tahun, Hakim Vonis 2 Tahun

DENPASAR, NusaBali

Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Rendang, Karangasem, I Wayan Sukertia, 48, yang menjadi terdakwa kasus korupsi langsung bernafas lega. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (1/4) menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada terdakwa Sukertia yang turun jauh dari tuntutan jaksa 8 tahun penjara.

Dalam amar putusan yang dibacakan majelis hakim pimpinan Engeliky Handajani Day *via video conference* menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 3 UU Tipikor. Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi hukuman 2 tahun penjara.



● NUSABALI/REZA

SIDANG online putusan korupsi dengan terdakwa I Wayan Sukertia, Ketua UPK PNPM Mandiri Rendang, Karangasem di Pengadilan Tipikor Denpasar pada Rabu (1/4).

Putusan ini jauh berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Putu Gde

Suriawan. Dalam tuntutan sebelumnya, terdakwa Sukertia dijerat Pasal 2 UU Tipikor, Jo

Pasal 55 ayat ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHPidana. Terdakwa dituntut hukuman 8 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsidi 6 bulan kurungan dan diwajibkan mengganti kerugian negara.

Atas putusan tersebut, terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya Gede Pasek Suardika dkk belum menyatakan sikap atas putusan majelis hakim. Sementara JPU Suriawan menyatakan hal yang sama. "Kami pikir-pikir Yang Mulia," ujar JPU.

Dalam kasus ini, terdakwa I Wayan Sukertia sebagai Ketua UPK PNPM Mandiri Karangasem membuat kelompok fiktif untuk mencairkan anggaran PNPM. Dalam kasus ini, negara dirugikan hingga Rp 1.963.417.000 sebagaimana dalam dakwaan jaksa. rez



Dampak Warga Desa Lebih Gugat Perbekel

BPD Lebih Stop Proyek

Taman Desa

Geria Wahyuni mengaku tak bersalah atas pelaksanaan proyek yang diprotes warga.

GIANYAR, NusaBali

Badan Perwakilan Desa (BPD) Lebih, Kecamatan, Gianyar, akhirnya menyetop pelaksanaan proyek senderan dan taman di ujung utara desa setempat. Keputusan itu diambil melalui rapat khusus dihadiri Perbekel Lebih Ni Wayan Geria Wahyuni, di Kantor Desa Lebih, Senin (30/3) malam.

Rapat juga memutuskan, dana proyek dari APBDes sekitar Rp 300 juta itu akan dialihkan untuk biaya penanggulangan wabah Covid-19 atau Corona di Desa Lebih. Saat dikonfirmasi, Selasa (31/3) di kantornya, Perbekel Ni Wayan Geria Wahyuni membenarkan keputusan rapat yang dia sebut sebagai 'musyawarah desa khusus' tersebut. Namun dia menerangkan secara detail, proyek yang ditutup bukan

proyek keseluruhan, melainkan hanya proyek senderan dan taman di wilayah Desa Serongga (utara Desa Lebih, Red). Kata dia, proyek senderan tanah geria milik keluarganya di selatan irigasi subak setempat, tetap digarap dengan dana APBDes sekitar Rp 130 juta. "Karena yang dimasalahkan oleh warga kami melalui spanduk itu kan proyek senderan dan taman di lokasi luar desa (Desa Serongga, Red)," ujar perbekel perempuan satu-

satunya dari 64 desa di Kabupaten Gianyar ini.

Geria Wahyuni mengaku tak bersalah atas pelaksanaan proyek yang diprotes warga melalui tiga spanduk itu. Dia mengakui hanya keliru akibat miskomunikasi dengan pihak BPD dan warga. Karena adanya protes warga melalui tiga spanduk itu, Geria mengaku psikis keluarga termasuk suaminya, sempat syok. Dia wanti-wanti minta agar keluarganya kuat

menghadapi masalah dirinya.

Terkait polemik proyek di desa ujung selatan Kecamatan Gianyar itu, Selasa (31/3) siang, Perbekel Geria Wahyuni mengaku dipanggil oleh Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Gianyar Dewa Ngakan Putu Adi (bukan Dewa Ngakan Ngurah Adi, Red). Namun Ngakan Adi saat dikonfirmasi via telepon beberapa kali dan WA (whatsapp), tak memberikan tanggapan.

Dihubungi terpisah, Ketua BPD Lebih I Wayan Wijaya mengakui penghentian proyek itu bukan secara menyeluruh. Jelas dia, yang distop hanya proyek senderan dan taman di utara irigasi atau di wilayah Desa Serongga. "Sedangkan proyek senderan selatan irigasi atau senderan geria, tetap jalan. Karena lokasi senderan geria ini ada di wilayah Desa Lebih," jelasnya.

Sementara itu, anggota BPD Lebih yang juga Ketua Sabha Desa Lebih I Gede Parta Wijaya mengaku ikut rapat bersama jajaran BPD dan Perbekel Lebih, Senin (30/3) malam. Kata dia, rapat itu menelorkan salah satu kesimpulan, yakni menutup pelaksanaan proyek itu. Setahunya, dalam rapat itu tak ada

disinggung secara detail tentang proyek yang ditutup hanya proyek utara irigasi subak yang berupa senderan dan taman desa. "Tak ada penjelasan kalau proyek di selatan irigasi (senderan geria, Red) itu tetap jalan. Tak ada penjelasan sedetail itu. Kalau ada rapat lagi tadi siang (Selasa, 31/3, Red) hingga muncul perubahan, saya tak tahu. Karena saya tak ikut rapat," jelasnya.

Sebelumnya, warga Desa Lebih, Kecamatan/Kabupaten Gianyar memprotes perbekelnya, Ni Wayan Geria Wahyuni. Protes dalam bentuk tulisan pada spanduk berjudul 'Rakyat Menggugat', dipasang warga, Minggu (29/3) itu, karena Perbekel Geria membuat senderan di tanah keluarganya. Dia juga dituduh menggarap proyek ini secara KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

Salah satu spanduk berjudul 'Rakyat Menggugat'. Di bawahnya bertulis kata-kata berpesan cadas, yakni 'Ganti perbekel tamak/rakus curang. Lebih baik untuk beli disinfektan untuk basmi Corona. Di bagian tengah lembaran spanduk bertulis 'Hentikan Proyek Ini'. **Isa**



Terdakwa Sudutkan Eks Perbekel

★ Korupsi APBDes Dauh Puri Kelod



● NUSABALI/YUDA

Terdakwa Ariyaningsih saat diperiksa di Pengadilan Tipikor Denpasar.

DENPASAR, NusaBali
Mantan Perbekel Dauh Puri Kelod yang kini menjabat anggota DPRD Kota Denpasar, I Gusti Made Namiartha kini berada di ujung tanduk. Dalam sidang korupsi APBDes dengan terdakwa mantan bendahara Desa Dauh Puri Kelod, Ni Putu Ariyaningsih, eks Perbekel Namiartha disebut sempat menarik uang sendiri tanpa pertanggungjawaban.

Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa Ariyaningsih di Pengadilan Tipikor Denpasar pada

Rabu (1/4), Ariyaningsih mengakui jika Namiartha sempat mengambil uang sendiri sebanyak dua kali pada 2014 sebanyak Rp 75 juta. Pengambilan uang tersebut tanpa sepengetahuan Ariyaningsih sebagai bendahara dan hanya dilaporkan kepada Kaur Keuangan.

Selebihnya, Ariyaningsih lebih banyak 'pasang badan' dan memilih menanggung sendiri masalah ini. Seperti saat ditanya soal kerugian negara yang akhirnya diakui seluruhnya oleh Ariyaningsih. Padahal, dalam

beberapa pengakuan diawal, Ariyaningsih mengatakan jika dirinya hanya memakai sebagian uang dari kerugian negara Rp 1 miliar lebih. Meski akhirnya dirinya yang mengembalikan sisa kerugian negara Rp 778 juta saat ditahan penyidik Kejari Denpasar.

Majelis hakim pimpinan Wayan Gede Rumega bersama Esthar Oktavi dan Nurbaya Lumban Gaol, berusaha mengorek dana silpa yang digunakan terdakwa. Namun saksi tidak bisa memberikan keterangan pasti.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kadek Wahyudi yang ditemui Kamis (2/4) membenarkan terkait keterangan terdakwa yang mengakui jika Perbekel sempat mengambil uang sendiri pada 2014 lalu tanpa sepengetahuannya. "Ada juga bukti rekening koran pengambilan uang tersebut," tegas JPU Kadek Wahyudi.

Sementara Kasi Pidsus Kejari Denpasar, Nengah Astawa yang ditanya perkembangan penyidikan untuk tersangka baru belum bisa berkomentar. "Nanti kami infokan kalau ada perkembangan," tegasnya. **rez**



Aman, DAK untuk Sarana Prasarana Pendidikan ✓

Disdikpora Buleleng Kelola Rp 26 Miliar

SINGARAJA, NusaBali

Sejumlah kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pusat untuk pemenuhan sarana prasana pendidikan di Buleleng dijamin aman dari rasionalisasi penanganan Covid-19. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng menerima Rp 26 miliar DAK Pusat yang diperuntukkan untuk pembangunan fisik dan non fisik bidang pendidikan.

Sekretaris Disdikpora Buleleng, Made Astika Kamis (2/4) mengatakan Rp 26 miliar DAK itu terinci untuk SD sebesar Rp 8 miliar, jenjang SMP Rp 12 miliar dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp 6 miliar. "Sesuai dengan SE 247/MK.07 Tahun 2020, DAK Disdikpora tidak mengalami penundaan. Yang kena di bidang pendidikan ada di sub bidang Gedung Olahraga dan sub bidang Perpustakaan Daerah sehingga kami masih aman



Made Astika

karena dua sub itu sudah beda lembaganya," jelas Astika.

Puluhan miliar DAK Pusat itu juga dijelaskan Astika akan diperuntukkan bagi pembangunan fisik yang meliputi pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), rehab ruang kelas, pembanguann gedung perpustakaan di SD, dan pembangunan toilet. Sedangkan non fisik

meliputi pengadaan paket buku perpustakaan, pengadaan alat peraga, prasarana multimedia hingga pengadaan alat kesenian.

Sementara itu pencairan dan pelaksanaan DAK Pusat itu akan dilaksanakan secara bertahap hingga akhir tahun mendatang. Seluruh dana bantuan akan dicairkan ke masing-masing sekolah yang menerima dan dikelola langsung secara swadaya. Namun Disdikpora Buleleng tetap mendampingi dan segera akan melakukan pertemuan terbatas membahas realisasi bantuan DAK yang rencananya akan cair tahap I pada awal April ini.

"Secara bertahap kami akan diskusikan mungkin empat sekolah tiap hari membahas soal bagaimana regulasi pajak yang ditanggung sekolah, termasuk pendampingan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng dan Inspektorat. k23



Bangunan di Pantai Berawa Belum Kantongi IMB

DPMPTSP Minta Proyek Dihentikan

Mangupura (Bali Post) -

Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung langsung menindaklanjuti pembangunan restoran dan bar di Pantai Berawa, Tibubeneng, Selasa (31/3) kemarin. Alhasil, bangunan yang berdiri tepat di bibir pantai berpasir putih itu belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kepala DPMPTSP Kabupaten Badung I Made Agus Aryawan mengatakan, hasil pengecekan dokumen perizinan dan inspeksi lapangan ditemukan bahwa pembangunan di kawasan Pantai Berawa tersebut milik PT Sayap Suci Bali dengan rencana usaha restoran dan bar. Usaha ini belum memiliki perizinan lengkap sesuai ketentuan. "Sampai hari ini baru memiliki Informasi Tata Ruang (ITR), sehingga saya pastikan belum memiliki IMB," tegasnya didampingi Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sang Nyoman Oka Permana serta Kabid Pengendalian dan Pelaksanaan I Wayan Sudira.

Menurut Agus Aryawan, pelaksanaan lapangan yang juga mewakili pihak *owner* mengakui belum memiliki IMB. Namun tim menemukan kondisi di lapangan sudah ada aktivitas pe-

nataan lahan, pembangunan struktur dinding penahan tanah (DPT) serta fondasi kolam renang. "Berdasarkan ketentuan Perda Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung, jarak sempadan pantai ditetapkan 100 meter, sehingga tidak kami izinkan terdapat struktur bangunan pada areal sempadan dimaksud," terangnya.

Agus Aryawan menambahkan, pembangunan juga harusnya dapat dilaksanakan setelah IMB terbit mengacu pada ITR, Izin Lingkungan dan izin-izin yang diterbitkan melalui OSS. "Guna mengendalikan terjadinya pelanggaran lebih jauh, kami segera keluarkan surat peringatan dan meminta pelaksana lapangan agar menghentikan sementara pembangunannya, karena belum memiliki IMB," tegasnya.

Agus Aryawan menegaskan, pi-

haknya juga telah berkoordinasi dengan Satpol PP agar mengawasi dan mengendalikan kondisi di lapangan supaya pembangunan dihentikan sementara.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara saat dikonfirmasi terkait keberadaan bangunan pariwisata itu mengakui sempat mendatangi proyek tersebut. "Kami sudah mengecek ke lokasi proyek. Di situ rencananya dibangun *beach club* dengan konsep *green garden*," ujarnya.

Menurut birokrat asal Denpasar ini, IMB bangunan tersebut masih dalam proses. "Bangunan hanya beberapa tempat masih dalam proses IMB. Saat ini pun pembangunannya dihentikan, karenaantisipasi wabah Corona," pungkasnya. (kmb27)



Revitalisasi Pasar Banyuasri Baru Jalan 30 Persen

Singaraja (Bali Post) -

Meskipun muncul wabah Covid-19, namun pelaksanaan proyek infrastruktur Pasar Banyuasri di Buleleng tetap berlangsung. Proses pengerjaannya baru jalan 30 persen oleh pihak pemborong mega proyek revitalisasi pasar di Kecamatan Buleleng. Disebutkan, pelaksanaan itu lebih cepat dari target yang ditetapkan sebesar 27 persen.

Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Buleleng, Putu Adipta Ekaputra, Selasa (31/3) kemarin mengatakan, saat ini proyek di lapangan itu sedang memasang struktur pondasi bagian bawah. Selain itu juga pembuatan kolom bangunan.

Khusus gedung induk, pihak pelaksana telah mengerjakan tahapan pembangunan lantai dua. "Sampai saat ini, pelaksanaan on progres dan tetap sesuai *schedule*. Rekanan juga sudah membangun rumah toko (*ruko*) yang di sebelah barat gedung induk



Bali post/ist

Putu Adipta Ekaputra.

itu," katanya.

Imbas Covid-19, membuat pelaksanaan proyek di lapangan terpengaruh harga material. Dia mencontohkan, beberapa bahan bangunan seperti besi dan semen sekarang mulai merangkak naik, karena mengikuti pergerakan mata uang dolar Amerika. Meski terjadi kenaikan eskalasi harga, hal ini menjadi tanggung jawab rekanan. Artinya, pemerintah tetap saja

menuntut rekanan melaksanakan mega proyek senilai Rp 180 miliar itu.

Untuk pengerjaan proyek itu dikerahkan lebih dari 250 orang tenaga kerja. "Proses pengerjaannya terus dipantau, sehingga kualitasnya tetap terjaga," jelasnya.

Revitalisasi Pasar Banyuasri yang dilakukan Pemkab Buleleng itu, disebutkan menjadi pasar semi modern pertama di Bali Utara. Pasar terbesar kedua di Buleleng itu dibangun tiga lantai. Di lantai satu terdapat 200 los untuk pedagang komoditas basah dan 252 los pedagang yang menjual komoditas dagangan kering. Di lantai dua, dibangun 244 los dan 184 unit kios. Sedangkan di lantai tiga dijadikan pusat kuliner Buleleng dengan membuat 8 unit kios dan areal parkir yang berkapasitas 136 mobil. Pasar ini nantinya bisa menampung 1.448 pedagang dan akan dilengkapi lift barang dan lift penumpang. (kmb38)